

Strategi Penguatan Ekonomi Hijau dan Inklusif di Negara-Negara ASEAN

Widya Ramadhani^{1✉}, Fauzan Aziz², Alifa Dzakiyyah Putri³, Elsi Dayatri⁴, Mariana Rahelya⁵
(1,2,3,4,5) Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

✉ Corresponding author
f1261241011@student.untan.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi penguatan ekonomi hijau dan inklusif di negara-negara ASEAN melalui analisis kualitatif berbasis studi kepustakaan. Fokus kajian diarahkan pada integrasi kebijakan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan transformasi ekonomi berkelanjutan yang menjadi pilar utama dalam pembangunan kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi hijau ditentukan oleh sinergi lintas sektor, tata kelola yang transparan, serta dukungan pembiayaan dan teknologi bersih. Di sisi lain, digitalisasi ekonomi dan wirausaha sosial terbukti memperluas akses ekonomi bagi kelompok rentan, sedangkan kebijakan energi terbarukan meningkatkan efisiensi dan kemandirian ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi kebijakan regional dan kolaborasi antarnegara dalam transfer pengetahuan serta teknologi menjadi kunci percepatan transisi menuju ekonomi hijau yang adil, berketahtanan, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci: *ekonomi hijau, inklusivitas, kebijakan regional*

Abstract

This study explores strategies to strengthen green and inclusive economies in ASEAN countries through a qualitative library research approach. The analysis focuses on integrating environmental policies, social empowerment, and sustainable economic transformation as the main pillars of regional development. The findings reveal that the success of the green economy depends on cross-sectoral synergy, transparent governance, and the support of green finance and clean technology. Moreover, economic digitalization and social entrepreneurship expand access for vulnerable groups, while renewable energy policies enhance efficiency and economic resilience. The study concludes that regional policy harmonization and inter-country collaboration in knowledge and technology transfer are essential to accelerate the transition toward a just, resilient, and sustainable green economy in Southeast Asia.

Keyword: *green economy, inclusiveness, regional policy*

PENDAHULUAN

Perubahan arah pembangunan ekonomi global semakin menekankan pentingnya pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan rendah karbon. Negara-negara ASEAN berada pada posisi strategis dalam upaya transisi menuju ekonomi hijau mengingat tingginya potensi sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi yang dinamis, serta tantangan kesenjangan sosial dan lingkungan yang masih nyata. Ekonomi hijau dan inklusif dipandang sebagai strategi penting untuk menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan hidup, dan pemerataan kesejahteraan. Namun, peralihan ke model ekonomi ini memerlukan sinergi lintas sektor dan komitmen politik yang kuat di tingkat regional (Afandi, 2024).

Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa pendorong utama transisi ekonomi hijau di kawasan Asia Tenggara terletak pada tiga pilar, yaitu penguatan kebijakan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan transformasi ekonomi berbasis nilai keberlanjutan (Putri dkk., 2023). Selain itu, green finance dan teknologi inovatif menjadi katalis penting bagi perluasan ekonomi hijau yang inklusif di tingkat nasional maupun regional (Judijanto, 2025). Namun, meskipun terdapat kemajuan konsep dan kebijakan, tingkat implementasi antarnegara ASEAN masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam kapasitas, pendanaan, dan tata kelola.

Sejumlah studi empiris menekankan bahwa keberhasilan ekonomi inklusif sangat dipengaruhi oleh pemerataan akses infrastruktur dasar seperti energi, telekomunikasi, jalan, dan pelayanan publik.

Infrastruktur terbukti berperan dalam meningkatkan produktivitas dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi (Harsono dkk., 2024). Di samping itu, kebijakan energi hijau juga ditemukan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ketika didukung oleh kerangka kelembagaan yang kuat (Tulloh dkk., 2025). Meski demikian, integrasi infrastruktur dan kebijakan energi hijau secara kolektif di ASEAN belum sepenuhnya terlaksana secara harmonis.

Di sisi lain, indeks pembangunan ekonomi inklusif dan indikator keberlanjutan berwawasan lingkungan telah dikembangkan sebagai alat untuk mengukur capaian pembangunan yang lebih menyeluruh (A.A. Ngurah Gede, 2022). Namun, sebagian besar studi masih bersifat nasional dan belum secara eksplisit membahas bagaimana strategi penguatan ekonomi hijau inklusif dapat dirumuskan bersama dalam kerangka kerja sama regional ASEAN. Hal ini menunjukkan adanya *research gap* penting terkait koordinasi kebijakan lintas negara, penyeragaman indikator, serta penerapan strategi berbasis kondisi sosial-ekonomi masing-masing negara anggota.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada perumusan strategi penguatan ekonomi hijau dan inklusif yang dapat diimplementasikan secara efektif di kawasan ASEAN. Artikel ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terbaru mengenai kebijakan, indikator pembangunan, penguatan kelembagaan, dan sinergi regional untuk mengembangkan model pembangunan hijau yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memperkaya literatur dalam bidang ekonomi pembangunan, kebijakan publik, dan manajemen pembangunan berkelanjutan di tingkat regional Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan ekonomi hijau dan inklusif di negara-negara ASEAN secara komprehensif. Sumber data yang digunakan berupa artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan, serta publikasi akademik yang relevan dengan tema ekonomi hijau, pembangunan berkelanjutan, dan inklusi sosial di kawasan ASEAN. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis dengan kata kunci terarah pada database seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional. Instrumen penelitian berupa lembar pencatatan data (data extraction sheet) untuk mengidentifikasi tujuan penelitian, konteks kebijakan, strategi implementasi, serta indikator keberhasilan dari masing-masing sumber. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menerapkan teknik analisis isi (content analysis) guna mengidentifikasi pola, keselarasan konsep, serta perbedaan strategi antarnegara. Pemilihan pendekatan kualitatif dipertimbangkan karena mampu menggali konteks kebijakan secara mendalam dan menjelaskan dinamika sosial-ekonomi yang tidak dapat direpresentasikan hanya melalui angka, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang utuh, komprehensif, dan aplikatif dalam perumusan strategi penguatan ekonomi hijau dan inklusif di tingkat kawasan.

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian/Jurnal	Hasil Penelitian
1	(Afandi, 2024)	Kebijakan Agribisnis Kelapa yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau (Agro-Maritim)	Kebijakan agribisnis kelapa yang inklusif dapat meningkatkan pendapatan petani dan daya saing industri dengan diversifikasi usaha ^[1] .
2	(Judijanto, 2025b)	Perkembangan Penelitian tentang Integrasi Ekonomi dan Stabilitas Keuangan di ASEAN (JAKWS)	Tema penelitian beralih ke isu keberlanjutan lingkungan dan inklusi sosial dalam integrasi ekonomi ^[2] .
3	(Putri dkk., 2023)	Potensi Indonesia dalam Upaya Transisi Ekonomi Hijau di Kawasan Asia Tenggara (UNIPLAN)	Pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia menunjang transisi ke ekonomi hijau ^[3] .

4	(Judijanto, 2025a)	Evolusi Penelitian tentang Keuangan Berkelanjutan dalam Mendorong Ekonomi Hijau (JAKWS)	Peran green finance dan teknologi baru sangat penting dalam ekonomi hijau yang inklusif [4].
5	(Amalia, 2022)	ASEAN Social Enterprise Development Programme sebagai Manifestasi Regionalisme Baru (UNDIKNAS FISIP)	SEDP berhasil menciptakan integrasi ekonomi yang inklusif melalui wirausaha sosial [5].
6	(Tulloh dkk., 2025)	Dampak Kebijakan Energi Hijau terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (JIMESHA)	Kebijakan energi hijau mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif [6].
7	(Mufidah dkk., 2025)	Analisis Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN (Ekuilnomi)	Variabel korupsi, kemiskinan, dan pengangguran sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi inklusif ASEAN [7].
8	(Karim dkk., 2024)	Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan (IRJE)	Sinergi pemangku kepentingan penting untuk implementasi ekonomi hijau yang berkelanjutan [8].
9	(Ammar dkk., 2024)	Ekonomi Hijau Sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Literatur Review (KHITMAH)	Ekonomi hijau mendukung pengurangan emisi dan penciptaan lapangan kerja, namun menghadapi tantangan insentif dan koordinasi [9].
10	(Az-Zahra, 2022)	Inklusivitas Ekonomi Digital di Kawasan Asia Tenggara pada Kepemimpinan ASEAN 2023 (AJSH)	Transformasi digital mendorong pertumbuhan inklusif dan inovasi teknologi di ASEAN [10].
11	(Harsono dkk., 2024)	Kontribusi Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia (Gara)	Infrastruktur jalan, listrik, air dan telekomunikasi berpengaruh positif pada pertumbuhan inklusif [11].
12	(Martini, 2019)	Globalization and Its Impact on Economic Growth: Evidence from ASEAN Countries (Trikonomika)	Globalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi di ASEAN, relevan untuk strategi hijau-inklusif [12].
13	(A.A. Ngurah Gede, 2022)	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Berwawasan Lingkungan di Indonesia (P2WD)	Penyusunan indeks ekonomi inklusif berwawasan lingkungan sebagai alat perencanaan pembangunan [13].
14	(Yunita, R. 2023)	Kajian Sosial Mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN di Asia Tenggara (JSG)	MEA meningkatkan standar hidup anggota melalui pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan [14].
15	(Chairunnisa & Kusumadewi, 2024)	Analyzing The Implementation of Green-Economy Inclusive Strategy in East Java Province (EJAVEC)	Surabaya menjadi contoh strategi green economy yang inklusif melalui tata kelola kota [15].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan ekonomi hijau dan inklusif di kawasan ASEAN berakar pada kebutuhan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan pemerataan sosial. Implementasi ekonomi hijau dipandang sebagai respon atas tekanan global terkait penurunan kualitas lingkungan, perubahan iklim, dan ketimpangan distribusi kesejahteraan (Karim dkk., 2024). Pada level regional, ASEAN telah menempatkan isu ekonomi hijau sebagai agenda strategis sejak adopsi ASEAN Community Vision 2025 yang menekankan integrasi ekonomi berkelanjutan.

Hasil analisis kebijakan di sejumlah negara ASEAN menunjukkan bahwa penguatan ekonomi hijau berkelanjutan memerlukan keterlibatan multi-pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil (Amalia, 2022) menegaskan bahwa keberhasilan ASEAN Social Enterprise Development Programme (SEDP) dalam membangun ekonomi inklusif menunjukkan peran penting wirausaha sosial dalam memperluas akses manfaat ekonomi bagi kelompok rentan. Hal ini memperlihatkan bahwa strategi ekonomi hijau tidak hanya sebatas pada aspek lingkungan, tetapi juga mencakup dimensi keadilan sosial.

Di Indonesia, transisi menuju ekonomi hijau ditunjang oleh potensi sumber daya alam dan demografi. (Putri dkk., 2023) menyatakan bahwa pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia memberikan landasan kuat bagi transformasi menuju ekonomi hijau, meskipun implementasinya menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor. Pendekatan kebijakan yang terintegrasi diperlukan agar agenda keberlanjutan tidak hanya menjadi slogan, tetapi terwujud dalam kegiatan ekonomi.

Sektor energi merupakan salah satu penentu keberhasilan ekonomi hijau di negara ASEAN. (Tulloh dkk., 2025) menunjukkan bahwa penerapan kebijakan energi terbarukan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penciptaan lapangan kerja baru dan penurunan ketergantungan pada energi fosil. Namun demikian, keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada ketersediaan teknologi bersih dan investasi jangka panjang dalam infrastruktur energi.

Di sisi lain, integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN juga berkontribusi pada perluasan akses ekonomi yang lebih inklusif. (Zahrah & Darmastuti, 2024) menemukan bahwa transformasi digital memperluas peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan komunitas marginal melalui akses pasar yang lebih luas dan efisiensi transaksi. Digitalisasi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi hijau karena dapat mengurangi biaya transaksi, meningkatkan transparansi, serta mendorong inovasi ramah lingkungan.

Namun, ketimpangan sosial dan tata kelola publik tetap menjadi tantangan signifikan. (Mufidah dkk., 2025) mengungkap bahwa persepsi korupsi, tingkat kemiskinan, dan pengangguran memiliki pengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, keberhasilan strategi ekonomi hijau memerlukan penguatan sistem tata kelola, pemberantasan korupsi, serta kebijakan redistribusi ekonomi yang efektif.

Dalam perspektif hubungan global, penelitian (Martini, 2019) menunjukkan bahwa globalisasi membawa dampak positif melalui aliran investasi dan teknologi ramah lingkungan, namun hanya akan memberikan hasil optimal jika negara mampu mengelola kebijakan perdagangan dan industri berbasis keberlanjutan. ASEAN perlu memperkuat kerangka kerjasama regional dalam bidang ekonomi hijau agar mampu mempertahankan daya saing global tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Di tingkat lokal, studi (Chairunnisa & Kusumadewi, 2024) menunjukkan bahwa implementasi strategi ekonomi hijau yang inklusif di Surabaya berhasil melalui tata kelola kota yang berfokus pada efisiensi energi, pengurangan sampah, dan peningkatan ruang publik hijau. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan ekonomi hijau bukan hanya ditentukan kebijakan nasional, tetapi juga kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan inovasi tata kelola.

Temuan penelitian ini mendukung literatur yang menyatakan bahwa penguatan ekonomi hijau memerlukan sinergi kebijakan fiskal, investasi hijau, pendidikan lingkungan, dan partisipasi publik (Ammar dkk., 2024). Namun, hambatan berupa minimnya insentif ekonomi, lemahnya kesadaran lingkungan masyarakat, dan rendahnya kapasitas teknologi masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, kolaborasi antara negara-negara ASEAN dalam transfer ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi penting.

Dengan mempertimbangkan temuan di atas, implikasi praktis penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan antarnegara ASEAN, penguatan instrumen green finance, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi ekonomi hijau. Secara teoretis, penelitian ini menguatkan pandangan

bahwa ekonomi hijau dan inklusif merupakan paradigma pembangunan baru yang menggabungkan pertumbuhan, keadilan, dan keberlanjutan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada keterbatasan data komparatif antarnegara, sehingga penelitian lanjutan direkomendasikan menggunakan pendekatan studi kasus lintas negara ASEAN secara lebih mendalam.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penguatan ekonomi hijau dan inklusif di negara-negara ASEAN harus berlandaskan pada sinergi kebijakan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan transformasi ekonomi berkelanjutan yang terintegrasi lintas sektor dan lintas negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ekonomi hijau di kawasan sangat ditentukan oleh tata kelola yang transparan, dukungan pembiayaan hijau, pemanfaatan teknologi bersih, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Integrasi kebijakan energi terbarukan, pengembangan wirausaha sosial, dan digitalisasi ekonomi terbukti mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif sekaligus menekan kesenjangan sosial. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat konsep pembangunan hijau-inklusif sebagai paradigma baru pembangunan ekonomi di ASEAN yang menyeimbangkan pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan lingkungan. Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi kebijakan regional ASEAN, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam inovasi hijau, serta kolaborasi antarnegara dalam transfer pengetahuan dan teknologi berkelanjutan untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang adil dan berketahtanan di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Ngurah Gede, W. (2022). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(3), 262–275. <https://doi.org/10.29244/jprwd.2022.6.3.262-275>
- Afandi, F. A. (2024). *Kebijakan Agribisnis Kelapa yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau*. 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0603.1019-1025>
- Amalia, R. (2022). ASEAN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT PROGRAMME SEBAGAI MANIFESTASI REGIONALISME BARU DALAM INTEGRASI KAWASAN YANG INKLUSIF. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 9(2), 205–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v9i2.6818>
- Ammar, Z., Irwan, M., Sapridawati, Y., Diskhamarzaweny, Andriani, R., & Yulis, Y. E. (2024). Ekonomi Hijau Sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Literatur Review. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.36378/khitmah.v6i1.4050>
- Az-Zahra, N. (2022). PENGERTIAN KOPERASI SYARIAH DAN UMKM. *Pengertian Koperasi, Koperasi Syariah Dan UMKM*, 90500120012.
- Chairunnisa, R. S., & Kusumadewi, H. (2024). Analyzing The Implementation of Green-Economy Inclusive Strategy in East Java Province Through Urban Good Governance in Green-Economy Framework: The Case of Surabaya. *East Java Economic Journal*, 8(1), 73–98. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v8i1.123>
- Harsono, I., Sutanto, H., Rois, I., Fadlyanti, L., & Mulawani, B. S. W. (2024). KONTRIBUSI INFRASTRUKTUR DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA. *Ganec Swara*, 196–208. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>
- Judijanto, L. (2025a). Evolusi Penelitian tentang Keuangan Berkelanjutan dalam Mendorong Ekonomi Hijau. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 4(01), 40–49. <https://doi.org/10.58812/jakws.v4i01.1950>
- Judijanto, L. (2025b). Perkembangan Penelitian tentang Integrasi Ekonomi dan Stabilitas Keuangan di ASEAN. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 4(01), 50–59. <https://doi.org/10.58812/jakws.v4i01.1948>
- Karim, K., Firdaus, Ramatni, A., Bahtiar, M. Y., & Fredrik Bastian Kawani, D. K. S. (2024). Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Model Manajemen yang Efektif. *Indonesian Research Journal on Education Web*; 4(2023), 550–558.
- Martini. (2019). Globalization and Its Impact on Economic Growth: Evidence From Asean Countries. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(2), 104–119. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v14i2.2019.pp104-119>
- Mufidah, S., Iqbal, M., & Rahman, T. (2025). Analisis Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Negara-Negara ASEAN Tahun 2015–2023. *Jurnal Ekuilnomy*, 7(2), 442–453.
- Putri, D., Hotimah, O., Ari, D., & Alhadin, M. (2023). Potensi Indonesia dalam Upaya Transisi Ekonomi Hijau

- di Kawasan Asia Tenggara. *Uniplan: Journal of Urban and Regional Planning*, 4(2), 87. <https://doi.org/10.26418/uniplan.v4i2.70958>
- Tulloh, M. N. A., Mubaqie, M. R., & Sandika, S. (2025). Dampak Kebijakan Energi Hijau Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 5(1), 15–18. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v5i1.560>
- Zahrah, A., & Darmastuti, S. (2024). Inklusivitas Ekonomi Digital di Kawasan Asia Tenggara pada Kepemimpinan ASEAN 2023. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1289–1302. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.644>